



Transportasi Umum Ibu Kota Baru Tanpa Pengemudi

JAKARTA, TRIBUN - Presiden Joko Widodo minta moda transportasi umum di ibu kota negara baru di Kalimantan Timur bersistem autonomous atau tanpa pengemudi. Oleh karena itu, Jokowi mengingatkan desain ibu kota negara baru harus bisa mendukung sistem tersebut.

"Di ibu kota baru nanti transportasi umumnya, transportasi massanya, akan menggunakan autonomous vehicle," ujar Jokowi rapat terbatas lanjutan persiapan pemindahan ibu kota di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/1).

■ Bersambung ke hal. 7

Untuk mendukung penerapan sistem tersebut, Presiden Joko Widodo mengingatkan desain kawasan ibu kota negara baru dapat mendukung. Jokowi meminta Menteri Perhubungan Budi Karya dan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro untuk berdiskusi mengenai desain ibu kota negara baru dan penerapan sistem autonomous.

"Kendaraan privatnya juga akan menggunakan autonomous car sehingga desainnya seperti apa, tolong nanti Pak Menteri Perhubungan dan Pak Menteri Riset berbicara mengenai ini, mengenai kesiapan," kata Jokowi.

"Karena infrastruktur, kalau kita betul-betul siap, infrastrukturnya juga diarahkan kepada penggunaan electric vehicle dan autonomous vehicle," sambung Presiden.

Menteri Perhubungan Budi Karya menjelaskan transportasi umum yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo adalah kendaraan masa depan. Oleh karena itu, Budi Karya menilai pemerintah harus menyiapkan dua hal.

"Satu, kita membuat road map-nya, apa dulu yang harus dibuat. Setelah itu saya

meminta Kementerian Perindustrian untuk mempromosikan industri mobil elektrik," kata Budi setelah rapat.

Budi menuturkan tahap pertama penerapan sistem autonomous vehicle akan diterapkan di bus yang menghubungkan Balikpapan dengan lokasi ibu kota negara baru dan kereta. Setelah itu akan dibangun moda raya terpadu atau MRT.

"Harapan kita 2024, tapi seperti disampaikan Presiden, kita ini fleksibel, pencapaian-pencapaian itu fleksibel. Bisa saja 2024 kita harapkan, tapi bisa butuh waktu lagi karena pertimbangan tertentu," ujar Budi.

Presiden Joko Widodo memperkirakan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk membangun ibu kota negara baru tidak lebih dari Rp100 triliun. "Saya melihat pemerintah tidak akan keluar lebih dari Rp100 triliun," kata Jokowi.

Biaya pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur diperkirakan mencapai Rp466 triliun. Anggaran pembangunan berasal dari APBN sebesar 19,2 persen atau Rp89,4 triliun, dari skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebesar 54,4 persen atau Rp253,4 triliun dan dari

swasta sebesar 26,4 persen atau sebesar Rp123,2 triliun.

Jokowi mengatakan luas tanah yang disiapkan untuk ibu kota negara baru di Kalimantan Timur mencapai 256 ribu hektare. Namun demikian, tanah yang akan digunakan hanya 56 ribu hektare. Kawasan pemerintahan di ibu kota negara baru akan menempati lahan seluas 5.600 hektare.

Pembangunan infrastruktur dasar di ibu kota negara baru akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pembangunan tersebut meliputi pembangunan Istana Presiden dan gedung-gedung kementerian.

"Di luar itu baru kita berikan kepada proses PPP (KPBU) atau dikerjakan oleh investasi. Saya berharap ini betul-betul dihitung secara detail," kata Jokowi.

Terkait lahan pembangunan ibu kota negara baru, Jokowi menjelaskan saat ini telah disiapkan 256 ribu hektare. Jika ditambah untuk keperluan riset, maka luas lahan yang disiapkan mencapai 410 ribu hektare.

"Yang akan kita gunakan adalah 56 ribu hektare, itu di inti, dan yang akan dimulai nantinya pada angka 5.000

hektare. Pak Menteri BPN, Menteri LHK, segera rampungkan masalah lahan ini sehingga nanti arsitek, desainer, urban planner-nya bisa masuk dan bisa menyelesaikan desainnya," ujar Jokowi.

Jokowi juga meminta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar untuk menyiapkan lahan kurang lebih 100 hektare. Lahan tersebut akan digunakan sebagai tempat penyiapan bibit pohon, termasuk mangrove.

"Kita harapkan dalam 100 hektare, mungkin bisa kita siapkan lebih dari 17 juta bibit tanaman di situ," kata Jokowi.

Presiden menambahkan bibit tanaman sangat diperlukan karena ibu kota negara baru mengusung konsep gagasan Nagara Rimba Nusa. Arti dari konsep itu adalah kita memiliki kewajiban untuk memperbaiki dari lingkungan yang kurang baik menjadi baik. (Tribun Network/sen/the)